

## Peran Bank Sentral Dalam Mempertahankan Stabilitas Sistem Keuangan Di Era Ekonomi Digital

Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya<sup>1\*</sup>, Astrid Ulya Paramitha Kahfi<sup>2</sup>, Intan Masfaur Rohmah<sup>3</sup>, Rini Puji Astuti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>[ramadhantibulan059@gmail.com](mailto:ramadhantibulan059@gmail.com), <sup>2</sup>[astridulyaaa2@gmail.com](mailto:astridulyaaa2@gmail.com), <sup>3</sup>[intanmasfaurrr@gmail.com](mailto:intanmasfaurrr@gmail.com), <sup>4</sup>[rinipuji.astuti111983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti111983@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sistem keuangan global secara fundamental, mendorong munculnya inovasi seperti mata uang digital, sistem pembayaran berbasis teknologi, serta peningkatan peran perusahaan teknologi finansial (fintech). Transformasi ini menimbulkan tantangan baru bagi bank sentral dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran bank sentral beradaptasi dan merespons dinamika ekonomi digital dalam upaya mempertahankan stabilitas keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka dan analisis konten terhadap regulasi, laporan resmi, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sentral tidak hanya berperan sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai inovator dan katalisator digital, antara lain melalui pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC), penguatan pengawasan terhadap fintech, serta kolaborasi lintas lembaga dalam membangun infrastruktur keuangan digital yang aman dan inklusif. Dapat disimpulkan keberhasilan Bank Sentral dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan di era ekonomi digital sangat bergantung pada kemampuan adaptifnya terhadap perubahan teknologi serta sinergi kebijakan lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan keuangan digital yang inklusif dan stabil.

**Kata Kunci:** Bank Sentral, Stabilitas Sistem Keuangan, Ekonomi Digital, CBDC, Fintech.

### PENDAHULUAN

Sistem keuangan global telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Era ekonomi digital ditandai dengan munculnya berbagai inovasi seperti fintech, mata uang digital, pembayaran elektronik, dan platform keuangan berbasis teknologi lainnya. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas sistem keuangan.

Dalam situasi seperti ini, peran bank sentral semakin penting. Bank sentral bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan secara keseluruhan sebagai otoritas moneter dan pengawas sistem keuangan. Negara memiliki bank sentral. Tujuan utamanya adalah meningkatkan aktivitas ekonomi yang stabil dan tinggi. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi moneter secara keseluruhan. Menurut Bank Indonesia (BI), tugas bank sentral adalah untuk memperoleh dan memelihara keseimbangan nilai rupiah. Untuk mencapai hal ini, akuntansi keuangan dibagi menjadi tiga bagian: kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan negara.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh lembaga keuangan atau bank sentral untuk mencapai kemajuan aktivitas perekonomian yang diharapkan. Kemajuan ini diharapkan untuk mencapai keseimbangan makro ekonomi, yang ditunjukkan antara lain oleh harga stabil atau inflasi yang rendah. Produksi riil dan jumlah pekerjaan yang tersedia meningkat. Selain itu, kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan komponen penting dari kebijakan makro ekonomi, yang dalam implementasinya mempertimbangkan kegiatan perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara ditinjau dari tujuan dan mekanisme transmisi yang dapat diandalkan, serta komponen penting lainnya dalam ekonomi. Strategi dan mediasi yang dipilih menentukan struktur operasional kebijakan moneter.

Sistem keuangan adalah struktur dalam ekonomi suatu Negara yang memiliki lembaga-lembaga untuk menjalankan berbagai aktivitas keuangan. Sistem ini sebagian besar berfungsi untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki lebih banyak dana, seperti penabung, kepada pihak yang membutuhkannya. Dana ini kemudian dapat digunakan untuk investasi dan membeli barang dan jasa. Ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sistem keuangan memainkan peran penting dalam mendukung operasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan adalah jaringan yang menghubungkan berbagai lembaga dan pasar untuk mengatur aliran dana dalam perekonomian. Sistem pembayaran, sebagai salah satu komponen utama jaringan, memainkan peran strategis dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Pentingnya peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan semakin besar. Kemajuan teknologi digital yang cepat telah mengubah ekonomi secara substansial, termasuk sektor keuangan. Kondisi politik dan ekonomi memengaruhi peran dan tugas bank sentral. Namun, bank sentral memiliki tiga tugas utama: pengendalian moneter, pengaturan dan pengawasan

perbankan, dan pengaturan sistem pembayaran. Dalam tugas pengendalian moneter, bank sentral ditugaskan untuk menjaga stabilitas moneter, atau kestabilan harga nilai uang.

Studi ini bertujuan untuk mempelajari peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pesatnya inovasi dan teknologi digital di bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah baru yang dihadapi bank sentral saat menjalankan kebijakan moneter dan pengawasan perbankan di era digital, dan juga untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di masa depan, termasuk dalam menangani risiko sistemik yang muncul karena sistem keuangan digital semakin kompleks. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan kerangka kebijakan moneter dan pengawasan perbankan yang lebih sesuai dengan kemajuan teknologi digital. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menulis artikel yang diberi judul: **"Peran Bank Sentral dalam Mempertahankan Stabilitas Sistem Keuangan di Era Ekonomi Digital"**.

## METODE

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Bank Sentral dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana kebijakan dan strategi Bank Sentral beradaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan, seperti sistem pembayaran digital, cryptocurrency, dan inovasi lainnya yang mempengaruhi sistem keuangan nasional dan global. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka, yaitu dengan mempelajari refisi buku, artikel, dari sosial media, serta literature review yang ada kaitannya dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Kebanksentralan Dalam Stabilitas Ekonomi dan Keuangan

Bank sentral memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi dan keuangan. Adanya bank sentral menjadi peran kunci dalam sistem keuangan sebuah negara. Peran utama bank sentral tersebut melibatkan pengendalian kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan dukungan pada stabilitas nilai mata uang. Adapun peran umum bank sentral yakni dalam kebijakan moneter. Bank sentral lah yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter guna mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga dan kredit. Hal ini bertujuan supaya dapat menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Indonesia mempunyai Bank Sentral bernama Bank Indonesia yang didirikan berdasarkan Pasal 23D Undang Undang Republik Indonesia dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999. Bank sentral sendiri adalah milik negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan aktivitas perekonomian yang tinggi dan stabil. Di Indonesia, bank sentral yang mengatur seluruh jalannya sistem moneter disebut Bank Indonesia. Situs Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa sebagai bank sentral, BI memiliki satu tujuan yakni memperoleh dan memelihara keseimbangan nilai rupiah. Supaya meraih hal tersebut, BI di bagi menjadi 3 bidang: kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan negara.

Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework (OJK,2025).

Bank sentral mempunyai tanggung jawab agar merencanakan dan menjalankan kebijakan moneter untuk mengatur suku bunga, jumlah uang beredar, dan kredit. Adapun Tujuan paling utamanya dari adanya kebijakan moneter ini adalah melindungi stabilitas dari harga dan membantu adanya pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Stabilitas moneter di Indonesia mengacu pada keadaan perekonomian yang berlebihan, terutama terkait dengan tingkat harga, nilai tukar rupiah, terlindungi dari fluktuasi dan suku bunga. Sederhananya, stabilitas moneter berarti harga jasa dan barang relatif stabil, nilai tukar Rupiah tidak berfluktuasi dengan cepat, dan tingkat suku bunga berada pada tingkat yang wajar. Kondisi ini sangat penting untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Tugas yang utama BI tidak hanya menjaga konsistensi moneter, tetapi juga menjaga konsistensi sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Sistem keuangan merupakan salah satu saluran Tindakan kebijakan moneter, sehingga jika sistem keuangan tidak stabil maka transmisi kebijakan moneter tidak bisa berjalan secara normal. Di sisi lain, ketidakstabilan mata uang mempunyai dampak mendasar terhadap stabilitas sistem keuangan karena sistem keuangan tidak berfungsi secara efektif.

Pada Bank Indonesia (2009), BI memperkenalkan berbagai macam kebijakan dan instrumen untuk menjaga stabilitas/konsistensi sistem keuangan. Di sisi lain, cara untuk menjaga stabilitas keuangan adalah dengan menggunakan instrumen suku bunga BI. Saat ini terdapat bank BI Syariah yang menggunakan sistem Wakalah. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa peran utama BI sebagai otoritas keuangan adalah merencanakan dan menyiapkan program keuangan; Untuk mengedarkan uang (Ilmi, 2024).

Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam menjaga stabilitas mata uang melalui berbagai kebijakan moneter, antara lain: (Astutik, 2024)

- a. Pengelolaan suku bunga: BI dapat Suku bunga dapat dinaikkan atau diturunkan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang beredar di masyarakat. Suku bunga tinggi membantu mengendalikan inflasi, sedangkan suku bunga rendah mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Transaksi Keuangan: BI dapat membeli dan menjual Surat Berharga Negara (SBN) di pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Ketika BI membeli SBN, jumlah uang beredar meningkat, dan ketika BI menjual SBN, jumlah uang beredar berkurang.
- c. Intervensi di pasar valuta asing: BI boleh membeli atau menjual mata uang asing untuk mempengaruhi nilai tukar Rupiah. Pembelian mata uang asing oleh BI mengakibatkan rupiah menguat, sedangkan penjualan mata uang asing mengakibatkan rupiah melemah.

Selain kebijakan moneter, pemerintah juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan melalui kebijakan moneter yang hati-hati. Bank sentral juga berperan dalam pengawasan sistem keuangan. Bank sentral telah memainkan peran kunci utama dalam pengawasan dan regulasi lembaga-lembaga keuangan. Hal ini mencakup bank komersial, institusi keuangan non bank dan psar keuangan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Bank sentral memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas ekonomi melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Beberapa peran utama bank sentral dalam konteks ini melibatkan seperti dalam mengendalikan Inflasi. salah satu peran utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi. Dengan merancang kebijakan moneter yang tepat, bank sentral berusaha untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan, yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu bank sentral juga berperan dalam menjaga stabilitas mata uang. Bank sentral berupaya memelihara stabilitas nilai mata uang nasional. Nilai tukar yang stabil dapat menciptakan kepercayaan di pasar, mendorong perdagangan internasional, dan memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi. Kemudian juga mengatur tingkat suku bunga. Bank sentral menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen terkait pinjaman dan investasi. Dengan mengatur suku bunga, mereka dapat merespons perubahan kondisi ekonomi dan mengarahkan aktivitas ekonomi ke arah yang diinginkan. Menyelenggarakan operasi pasar terbuka. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah dapat memengaruhi likuiditas di pasar dan mendukung tujuan kebijakan moneter.

### Stabilitas Moneter di Indonesia

Sederhananya stabilitas moneter di Indonesia berarti harga barang dan jasa relatif stabil, nilai tukar rupiah tidak berubah dengan cepat, dan suku bunga berada pada tingkat yang wajar. Kondisi ini sangat penting untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menjaga konsistensi sistem keuangan (perbankan dan pembayaran) dan moneter adalah tugas utama BI (Ilmi, dkk, 2024: 60).

Sistem keuangan bertanggung jawab atas tindakan kebijakan moneter; oleh karena itu, jika sistem keuangan tidak stabil, transmisi kebijakan moneter tidak akan dapat dilakukan secara normal. Di sisi lain, ketidakstabilan mata uang berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan karena sistem tersebut tidak berfungsi dengan baik. Untuk menjaga stabilitas dan konsistensi sistem keuangan, BI membuat berbagai instrumen dan kebijakan. Di sisi lain, instrumen suku bunga BI adalah cara untuk menjaga stabilitas keuangan.

Bank BI Syariah saat ini menggunakan sistem Wakalah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tugas utama Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan adalah merencanakan dan menyiapkan program keuangan dan mengedarkan uang. Oleh karena itu, UU Nomor 3 Tahun 2004 menetapkan tanggung jawab dan fungsi Bank Indonesia untuk menerapkan pengelolaan uang berdasarkan prinsip syariah, termasuk menyesuaikannya dengan perkembangan operasional perbankan yang mengikuti prinsip syariah. BI mempengaruhi kuantitas uang (jumlah uang beredar) dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai stabilitas nilai mata uang Rupiah. Salah satu nama instrumen keuangan ini adalah Instrumen Pengelolaan Mata Uang.

Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam menjaga stabilitas mata uang melalui berbagai kebijakan moneter, antara lain:

- a. Pengelolaan suku bunga: BI memiliki kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Suku bunga tinggi membantu mengendalikan inflasi, sedangkan suku bunga rendah mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Transaksi Keuangan: Badan Investasi Negara (BIN) memiliki kemampuan untuk membeli dan menjual Surat Berharga Negara (SBN) di pasar terbuka. Ketika BIN membeli SBN, jumlah uang beredar meningkat, dan ketika BIN menjual SBN, jumlah uang beredar berkurang.
- c. Intervensi di pasar valuta asing: Bank Indonesia dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dengan membeli atau menjual mata uang asing. Pembelian mata uang asing menyebabkan rupiah menguat, sedangkan penjualan mata uang asing menyebabkan rupiah melemah.

Pemerintah juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan melalui kebijakan moneter yang hati-hati; ini berarti bahwa pemerintah harus menjaga defisit fiskal dan utang publik pada tingkat yang stabil.

Manfaat stabilitas moneter:

- Tingkat inflasi yang rendah: Inflasi yang rendah membantu masyarakat mempertahankan daya beli dan mendorong investasi.
- Nilai tukar yang stabil: Nilai tukar yang stabil membantu menjaga daya saing ekspor dan menarik investasi asing.
- Suku Bunga Stabil: Suku bunga stabil merangsang pertumbuhan ekonomi dan membantu menciptakan lapangan kerja.
- Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Stabilitas moneter merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Tantangan dalam menjaga stabilitas moneter:

- Gangguan eksternal: Gangguan eksternal, seperti gejolak perekonomian global atau bencana alam, dapat mempengaruhi stabilitas moneter.
- Tekanan fiskal: Tekanan fiskal yang tinggi dapat memaksa pemerintah mengambil tindakan yang dapat mengganggu stabilitas mata uang, seperti meningkatkan defisit anggaran atau mencetak terlalu banyak uang.
- Ekspektasi Inflasi: Ekspektasi inflasi yang tinggi dapat menyebabkan inflasi aktual yang lebih tinggi.

Suhartono menyatakan bahwa stabilitas harga di mana inflasi perekonomian hanya 1-2% per tahun dikenal sebagai stabilitas moneter. Deflasi juga mengancam stabilitas moneter, tetapi karena jarang terjadi, kurang diperhatikan. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Secara singkat, mengurangi inflasi merupakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi masalah bagi pemerintah secara global dan nasional. Pemerintah selalu menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai bukti keberhasilan pembangunan (Suhartono, 2009: 522).

Untuk mendorong intermediasi berjalan dan menjadi lebih dalam secara finansial, inflasi yang tinggi membuat agen bertindak dalam perspektif jangka pendek. Moral hazard dari ketidakpastian informasi dan ekspektasi ekonomi membuat sistem kerja menjadi kurang efisien dalam alokasi sumber daya, sehingga pembiayaan akan masuk ke ekonomi yang berisiko dan menghasilkan hasil yang tinggi saja. Proses pertumbuhan ekonomi tidak terjadi karena investasi jangka panjang menurun.

Kebijakan moneter yang tepat adalah kunci untuk menjaga inflasi. Bank sentral memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas perbankan melalui pinjaman terakhir. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas hanya berfokus pada upaya tidak langsung Bank Sentral untuk mencegah krisis keuangan. Akibatnya, kenaikan tingkat inflasi akan memperburuk krisis keuangan pada level apapun.

Institusi keuangan selalu menghadapi mismatch maturity, yang berarti mereka kehilangan jatuh tempo lebih cepat daripada aset kredit mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan krisis. Dengan demikian, bank rentan terhadap risiko likuiditas karena pada saat inflasi tinggi, suku bunga akan naik lebih cepat daripada suku bunga kredit. Akibatnya, net interest margin bank akan menjadi lebih kecil, yang mengganggu potensi pendapatan bank yang dapat diprediksi dalam situasi ketidakpastian. Kebijakan moneter yang mengarah pada penetapan stabilitas akan mendorong stabilitas sistem keuangan, karena penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga atau inflasi telah menyebabkan krisis keuangan di banyak negara (Diamond & Dybyg, 1983)

Menyelidiki alasan mengapa banyak variabel ekonomi berkumpul dan dampaknya terhadap pertumbuhan atau ekonomi. Salah satu kesimpulan yang dia buat adalah bahwa stabilitas nilai tukar, yaitu sistem kurs tetap, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada inflasi dan suku bunga. Sebaliknya, kebijakan harga suku bunga berdampak lebih besar daripada kebijakan kurs, seperti yang ditunjukkan oleh simulasi kebijakan yang menunjukkan kebijakan stabilisasi harga. Tidak ada perbedaan mendasar antara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, tetapi keduanya mempengaruhi satu sama lain (Devereux, 2006).

## Ruang Lingkup Pengawasan BSBI

Pada masa lalu banyak peristiwa pahit yang membuat posisi BI terpuruk, meskipun dalam beberapa aspek tertentu kebijakan itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lain yang lebih besar (yang diinisiasi oleh pemerintah). Kasus kebijakan BLBI dan bailout Bank Century merupakan contoh kebijakan BI yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan desain kebijakan pemerintah. Dari pengalamannya tersebut publik mendesak perlunya lembaga yang dapat mengawasi BI. Desakan itu disambut oleh DPR RI, dengan dimasukkannya salah satu pasal revisi UU BI No. 3/2004 sebagai amandemen atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Pasal tersebut tertuang dalam Pasal 58A yang menetapkan adanya lembaga pengawas BI tersebut, yang dikenal dengan sebutan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

BSBI dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, yang bertujuan mengupayakan peningkatan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Maksud dari pengawasan di bidang tertentu di s (Indonesia, 2018) ini adalah melaksanakan tugas (Bank Indonesia, 2009:3): (1) telaahan atas laporan keuangan tahunan BI; (2) telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI; (3) telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya BSBI tidak melakukan penilaian terhadap kinerja dewan gubernur, tidak ikut mengambil keputusan, serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang membuat penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang BI tersebut disampaikan kepada DPR, khususnya kepada Komisi XI. Selanjutnya, DPR mengevaluasi BI sesuai laporan yang disampaikan BSBI. Dari obyek penelaahan yang menjadi tugas BSBI, berkaitan dengan akuntabilitas BI kepada DPR, dan kewajiban BI menyampaikan laporan kepada DPR untuk kemudian dievaluasi oleh

DPR, terlihat bahwa pembentukan BSBI diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kegiatan operasional dan investasi BI.

Terkait dengan tugas BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, perbankan dan sistem pembayaran, eksistensi badan ini tidak mengurangi boleh mencampuri dan tidak boleh menilai kebijakan BI (di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank, serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter), serta tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur (Santoso & Koentoadji, 2005).

Kedudukan BSBI ini amatlah berbeda dengan kedudukan 2 (dua) badan yang ada pada tatanan kelembagaan yang digariskan pada UU No. 13/1968. Pertama, Komisaris Pemerintah seperti yang pernah diatur dalam Pasal 22 s/d 24 UU No. 13/1968 mengenai Bank Sentral, Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden dan tugasnya adalah mengawasi BI selaku perusahaan. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Komisaris Pemerintah mempunyai hubungan kerja yang bersifat langsung dengan BI, sedangkan dalam hal kedudukan BSBI tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan BI, melainkan dengan DPR Dalam konteks ini, BSBI mempunyai keperluan untuk berhubungan langsung dengan BI, maka tentunya badan ini terlebih dahulu harus memperoleh penugasan dari DPR. Kedua, BSBI pun berbeda dari Dewan Moneter sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 8 sd 14 UU No. 13 Tahun 1968 mengenai Bank Sentral, mengingat Dewan Moneter yang beranggotakan menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia bertugas mendukung pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter, sedangkan kedudukan BSBI adalah sebagai pembantu DPR untuk menelaah laporan/prosedur yang terkait dengan kegiatan/anggaran operasional BI, di luar kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran (Santoso & Koentoadji, 2005).

## KESIMPULAN

Bank Sentral memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, terutama melalui kebijakan moneter yang terukur dan efektif. Di era ekonomi digital yang berkembang pesat, peran tersebut semakin penting, karena Bank Sentral harus dapat menyesuaikan kebijakan untuk menghadapi tantangan baru, seperti teknologi finansial (fintech) dan mata uang digital. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan agar tetap berfungsi dengan baik dalam kondisi yang dinamis.

Stabilitas moneter di Indonesia dijaga oleh Bank Indonesia melalui kebijakan yang berfokus pada pengaturan suku bunga, intervensi pasar uang, serta kebijakan makroprudensial yang mencakup pengawasan terhadap lembaga keuangan dan sistem pembayaran. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, Bank Indonesia harus lebih waspada terhadap potensi gangguan yang dapat timbul akibat perkembangan fintech, transaksi digital, dan penggunaan mata uang kripto yang semakin luas. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus dapat menyeimbangkan inovasi dan risiko yang ada.

Ruang lingkup pengawasan Bank Sentral Indonesia mencakup tidak hanya lembaga keuangan tradisional, tetapi juga sektor fintech yang kini tumbuh pesat. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dalam sektor keuangan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan baru ini, Bank Indonesia perlu terus memperbarui kebijakan dan pengawasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan memastikan keberlanjutan ekonomi digital yang stabil dan aman.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah umat Islam yang akan memberikan syafaatnya di yaumul akhir.

Dalam pembuatan jurnal sebagai laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Atas segala bantuan dan dukungan tersebut, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi kami selama kegiatan belajar mengajar di lembaga yang di pimpinnya.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah S.H.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan persetujuan laporan ini.
4. Ibu Ana Pratiwi SE., Ak., MSA. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
5. Ibu Dr. Rini Puji Astuti, S. Kom. Msi selaku dosen mata kuliah Kebanksentralan.
6. Kepada orang tua, Keluarga tercinta kami yang telah mendo'akan, memberikan restu dan semangat dalam menyelesaikan laporan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, L. B. (2024). Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Moneter. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 60.
- Ilmi, V. A. (2024). Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Moneter. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 59.
- Indonesia, B. (2018). Tranmisi Kebijakan Moneter. <https://www.bi.go.id/id/money/transmissionpolicy/Isi/Default.aspx>.
- OJK. (2025, Maret). *Peran Bank Indonesia Stabilitas Sistem Keuangan*. Retrieved Maret 2025, from [ojk.go.id: https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx)
- M.B., D., P.R, L., & J., X. (2006). Exchange Rates and Monetary Policy in Emerging Market Economies. *The Economic Journal*, 116(511).

D.W., D., & P.H., D. (n.d.). Deposit Insurance and Liquidity. *Journal of Policy Economy*, 91.

Awad, Ibrahim (2010), Mekanisme transmisi moneter di perekonomian terbuka kecil : Kasus Mesir, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.XIV – 2011, edisi 1: 73-96

Suhartono. (2009). Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3).